

DINAMIKA MAJOR-POWER RELATION DAN PENGARUHNYA TERHADAP TATANAN REGIONAL ASIA-PASIFIK DI ERA KONTEMPORER

THE DYNAMICS OF MAJOR-POWER RELATION AND ITS INFLUENCES TOWARD ASIA-PACIFIC REGIONAL ORDER IN CONTEMPORARY ERA

Sony Iriawan¹

Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia
(soni.irawan19@gmail.com)

Abstrak – Asia-Pasifik sebagai “pivot” area abad ke-21, tentunya tidak terlepas dari beragam permasalahan yang menjadi agenda utama ketika membahas perkembangan politik internasional dewasa ini. Dinamika *major-power relation* sebagai gambaran kompleksitas hubungan Amerika Serikat-Cina telah berdampak signifikan terhadap tatanan regional di Asia-Pasifik. Urgensi pembentukan kembali tatanan regional Asia-Pasifik, menyimpan agenda “terselubung” ketika Cina sebagai *emerging power* secara perlahan menghadirkan ancaman bagi eksistensi hegemoni AS di kawasan. Dinamika *major-power relation* secara tidak langsung telah menciptakan persepsimenguatnya pengaruh Cina ditingkat regional yang berujung pada upaya pelemahan sentralistik kepemimpinan AS di Asia-Pasifik. Secara bersamaan, penciptaan perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan juga menuntut pembentukan kembali tatanan regional Asia-Pasifik yang dapat mengakomodir adanya kemungkinan jika benar-benar terjadi transisi kekuasaan AS terhadap Cina.

Kata Kunci : *major-power relation*, tatanan regional, Asia-Pasifik, Amerika Serikat, kebangkitan Cina

Abstract – *Asia-Pacific as the “pivot” of the 21st century area, related to the various issues that became the main agenda when discussing the development of international politics today. The dynamics of major-power relations as the complexity of the USA-China relations has effected significantly to the regional order in Asia Pacific has a “hidden” agenda when China as an emerging power presenting a threat towards US hegemony existence in the region. The dynamics of major-power relations have indirectly created perceptions of the strengthening of China’s influence in the regional level, which leads to the centralistic weakening of US leadership in Asia-Pacific. Simultaneously, the creation of peace and the stability of regional security also demands the re-establishment of an Asia-Pacific regional order that can accommodate the possibility of a truly transitional US power over China.*

Keywords: *major-power relation, world order, Asia-Pacific, United States of America, the rise of China*

¹ Alumnus Magister Ilmu Pertahanan M.Si (Han), pada Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul Bogor. Saat ini aktif sebagai jurnalis desk Internasional di portal online teritorial.com.

Pendahuluan

Dewasa ini, Asia-Pasifik menjadi sebuah kawasan dengan kompleksitas permasalahan yang cukup rumit, dimana telah berlangsung percepatan kemajuan ekonomi yang diiringi dengan ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan. Kompleksitas tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor geografis dimana Asia-Pasifik tidak hanya menjadi tempat “kediaman”, namun juga menyimpan banyak kepentingan nasional dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Cina, Jepang, dan Korea Selatan.² Asia-Pasifik juga dikenal sebagai “center of gravity” politik internasional dewasa ini, dimana pembentukan geoekonomi dan geopolitik kawasan menjadi fokus utama bagi setiap negara-negara yang berkepentingan atas wilayah tersebut terutama AS dan Cina. Struktur tatanan kawasan mengalami perubahan signifikan melalui fenomena kebangkitan Cina sebagai *emerging power*. Hal tersebut dibuktikan ketika Cina berhasil mengungguli Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia pada tahun 2010, dan menempati posisi kedua setelah AS sebagai negara dengan (GDP) terbesar di dunia.³

Kemunculan Cina sebagai kekuatan baru Asia, telah membawa dampak dan persepsi yang beragam. Kekhawatiran

dari berbagai pihak bermunculan, ketika mengaitkan fenomena Cina sebagai *emerging power* di kawasan dengan klaim sepihak Cina terhadap Laut Cina Selatan (LCS). Sejumlah akademisi dan pengamat mencatat bahwa Asia-Pasifik dewasa ini menyandang sebagai “pivot” area, yang sangat menentukan bagi masa depan AS sebagai negara hegemon maupun penantanginya yaitu Cina. Dengan demikian, persaingan strategis dalam bentuk apapun jika tidak dapat terakomodasi dengan baik akan berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan kawasan.⁴

Dinamika *major-power relation* sekarang ini menjadi “kata kunci” dalam melihat hubungan dan interaksi AS-Cina yang sangat menentukan konstelasi politik internasional dewasa ini. AS dengan status hegemoni tentu berada pada *status quo*, sehingga tatanan regional saat ini tidak terlepas dari pengaruh, *power*, dan kepentingan AS atas Asia-Pasifik. *Rebalancing of Asia* di tahun 2011, menggambarkan upaya AS untuk merespons perkembangan kebangkitan Cina yang semakin menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan kepentingan AS di Asia-Pasifik.⁵ Dengan demikian, istilah *major-power relation* merupakan gambaran dari keterhubungan dua kekuatan besar di Asia-Pasifik,

² Michael Yahuda, *The International Politics of The Asia-Pacific*, (New York: Routledge Curzon, 2004), hlm.8.

³ Yoko Hagiwara, “U.S. European Policies Toward China Amid Its Economic and Political Rise”, *Tokyo Economic Review*, Vol 1, No.10, 2006, hlm. 2.

⁴ Patrick M. Cronin, “Power and Order in the South China Sea : A Strategic Framework for U.S. Policy”, Center for a New American Security (CNAS), 2016, hlm.3.

⁵ Xenia Dormandy dan Rory Kinane, *Asia-Pacific Security A Changing Role for the United States*, (Chatham House Report: The Royal Institute of International Affairs, 2014), hlm. 1.

dimana terdapat korelasi didalamnya, yang lebih didominasi oleh kompetisi dan persaingan strategis antara AS dan Cina. Bagaimana dinamika *major-power relation* mempengaruhi pembentukan kembali tatanan regional di Asia-Pasifik, didasari pada persepsi AS-Cina dalam memproyeksi pembangunan kekuasaan di masa depan. Disamping itu, fenomena kebangkitan Cina menghadirkan tantangan struktural terhadap penciptaan stabilitas keamanan kawasan yang memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan, sebagai kelanjutan dari pengaruh Cina di kawasan.

Major-Power Relation dalam Persaingan Hegemoni Kawasan

Persepsi *major-power relation* dibangun atas dua argumentasi mendasar, yakni AS tetap mempertahankan *status-quo* sebagai negara hegemon, dan disisi lain Cina telah hadir sebagai *emerging-power* yang secara perlahan berupaya membangun kekuatan guna berada pada posisi yang setara dengan AS, sekaligus mempersiapkan diri menuju transisi kekuasaan.⁶ Transisi kekuasaan tentunya bukanlah perkara yang mudah. Cina sendiri menyadari bahwa menggantikan posisi AS sebagai hegemon tunggal dunia dalam waktu dekat ini merupakan hal yang mustahil.⁷ Diperkirakan bahwa Cina

⁶ Robert Daly, "How Washington Can Manage Sustainable Strategic Competition With China", *The Diplomat*, 22 September 2015, dalam <http://thediplomat.com/2015/09/how-washington-can-manage-sustainable-strategic-competition-with-china/>, diakses pada 21 Desember 2017.

⁷ Zhiqun Zhu, *US-China Relations in The 21st Century Power Transition and Peace*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 167.

sendiri masih belum mampu bersaing secara komprehensif dengan AS hingga pada tahun 2040an, walaupun dengan perolehan PDB Cina yang terus melonjak. Memaksakan kehendak untuk menandingi pengaruh AS terlebih dalam hal dominasi arsitektur keamanan kawasan, merupakan tindakan yang berakibat fatal bagi Cina.⁸ Hal ini berarti bahwa Cina walau dalam kondisi apapun tetap harus "menghormati" hegemoni AS. Menjadi layaknya sebuah "sub-sistem" di bawah struktur tatanan kawasan yang dikelola oleh AS, tentu merupakan alternatif cara seraya memperluas pengaruhnya di Asia-Pasifik. Hal tersebut membuka peluang bagi Cina, dimana sepanjang sejarahnya Cina tidak cukup banyak terlibat dan berpengaruh besar dalam pembentukan tatanan kawasan di Asia-Pasifik.

Asumsi mengenai ketegangan yang terjadi diantara keduanya bermuara kepada perilaku Cina yang mulai menunjukkan sikap yang kontra-produktif baik terhadap AS maupun hukum internasional, sebagaimana bentuk provokasi yang dilakukan Cina di LCS. Layaknya Perang Dingin, *security dilemma* mendominasi *decision maker* di Beijing. Agenda demokratisasi AS dianggap pelemahan terhadap politik dalam negeri Cina. Adapun *Rebalancing of Asia*, dipahami sebagai bentuk *containment strategy* melalui okupasi aktif militer AS di Asia-Pasifik sejak 2011. Bertumpu pada argumentasi realisme tersebut, maka bagi Cina peningkatan kapabilitas militer merupakan upaya *self defense* untuk

⁸ *Ibid*, hlm. 169.

melakukan “self help” dari ancaman hegemoni AS. Menyadari akan kondisi yang tidak mudah, pemerintah Cina meningkatkan kemampuan A2/AD (*anti-Access/area denial capabilities-submarines*) melalui instalasi ASCMs (*Anti-Ship Cruise Missiles*) atau ASBMs (*Anti-Ship Ballistic Missiles*) yang telah dikembangkan sejak tahun 2012.⁹ Untuk memberikan efek *deterrence* kepada AS, Cina menggelar SAMs (*Surface-to-Air Missiles*) di pulau Woody bagian dari kepulauan Paracels yang diklaim sejak lima dekade lalu.¹⁰

Kekuatan ekonomi yang dimiliki Cina saat ini nampaknya berpengaruh terhadap kapabilitas militer. Dimana perwujudan geostrategi atas penguasaan LCS, dilanjutkan dengan proyek reklamasi untuk tujuan militerisasi terhadap sejumlah karang dalam gugusan kepulauan Sparty. Peneguhan atas klaim sepihak di LCS merupakan urgensi yang terus diperjuangkan walaupun ditengah kecaman dan protes dunia internasional. Dengan ini, persaingan hegemoni di kawasan menjadi tujuan proyeksi kekuatan militer Cina. Ditegaskan dalam *Defense White Paper* (2008), Cina telah mengeluarkan kebijakan pertahanan yang bertumpu pada pentingnya penguasaan *Blue Water Navy*, guna mendukung proyeksi masa depan geostrategi Cina. Sebagai upaya menangkal persepsi dunia

⁹ Tetsuo Kotani, “US-Japan Allied Maritime Strategy: Balancing the Rise of Maritime China”, *Strategic Japan*, Center for Strategic and International Studies, 2014, hlm. 1.

¹⁰ Thomas G. Mahnken, *Asia in The Balance: Transforming US Military Strategy in Asia*, (Washington: A Project of America Institute, 2012), hlm.7.

internasional atas ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegaskan bahwa pembangunan kekuatan militer merupakan “self-defense facilities” untuk kepentingan keamanan nasional Cina, dan tidak ada bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.¹¹

Ditengah meningkatnya eskalasi konflik di LCS, AS di tahun 2015 mengambil langkah pencegahan dengan menambah jumlah armada di Pasifik, Armada 7th, yang bermarkas di Yokosuka. AS mendapat tambahan beberapa kapal *Battle-Surface Shipp*. Kemudian AS juga mengganti kapal induk *USS George Washington* dengan *USS Ronald Reagan*, mendatangkan kapal perang perusak kawal rudal terbesar *USS Zumwalt* (DDG 1000). Kapal perangproduksi *Bath Iron Works* seharga 4 Miliar USD, dilengkapi dengan senjata yang mampu menembak target dari jarak 100 mil, memiliki keunggulan yakni kemampuan 50 kali lebih sulit untuk terdeteksi oleh radar. Sejumlah 143 awak kapal terlatih juga turut disiagakan. Sebagai respons deklarasi Cina terhadap ADIZ (*Air Defense Identification Zone*) atas wilayah perairan Senkaku/Diaoyu, yang mendapat protes keras dari pemerintah Jepang, AS kembali menempatkan dua unit kapal perusak *Aegis* guna bersiaga di pangkalan Okinawa. Sejumlah 368.000 personel militer AS di Asia-Pasifik tetap

¹¹ Helen Davison, “South China Sea Dispute: Beijing Places missile launches on islang-as it happened”, 17 Februari 2016, dalam <http://www.theguardian.com/world/live/2016/feb/17/south-china-sea-disputes-bajing-Places-missile-launches-on-itslang-live>, diakses pada 2 Juli 2017.

dipertahankan. Di matra udara sejumlah 395 unit pesawat tempur generasi ke-5, F-35 dan F-22 dalam beberapa tahun ke depan telah dipersiapkan.¹² Strategi *Join Entry Operation* dan *Air Sea Battle* diadopsi guna melakukan reposisi pasukan yang bertujuan untuk mendukung penambahan kapal perang serta personil militer AS di Asia-Pasifik yang akan berlanjut hingga tahun 2020.¹³

Rebalancing of Asia menjadi agenda global, dimana “*deficit trust*” sebagaimana yang terjadi di LCS, nuklir Korea Utara, dan tumpang tindih klaim ADIZ di Asia Timur menjadi faktor utama mendorong kehadiran AS. Asia-Pasifik sebagai “Pivot” area abad ke-21, memasuki era baru ketika dominasi militer AS tersebut, merupakan wujud *containment strategy* terhadap Cina di kawasan. Namun pemerintah Cina menilai, intervensi Pentagon terhadap konflik LCS akan sangat berdampak fatal bagi keamanan kawasan. Alih-alih memberikan jaminan keamanan untuk penyelesaian sengketa secara damai, justru akan meningkatkan eskalasi konflik, ketika AS dan Cina tidak mampu menahan diri dari tindakan provokatif. Pengambil keputusan di Cina menilai, Washington tengah merumuskan cara tentang bagaimana langkah-langkah komprehensif yang berlandaskan pada norma dan hukum internasional. *Deficit*

¹² Jim Gramone, “Asia-Pacific Maritime Security Strategy”, 15 Februari 2015, dalam <http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-PMaritimeSecurityStrategy08142015-1300-FINALFORMAT.PDF>, diakses pada 17 Maret 2017.

¹³ Chirs Mills, *The United State Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*, (Sidney: Australian Defense College, 2015), hlm. 2.

trust yang ada justru membangun opini negatif Cina bahwa *freedom of navigation*, merupakan bentuk pemanfaatan terhadap isu konflik LCS guna menegaskan kembali dominasi AS di Asia-Pasifik.¹⁴

Dengan demikian *major-power relation*, berada pada titik yang cukup mengkhawatirkan, *balance of power* menciptakan lingkungan strategis baru dimana kebangkitan Cina sama halnya dengan kebangkitan kembali realisme internasional. Realis memahami bahwa *distribution of power* baik AS maupun Cina telah menghantarkan pada struktur kekuasaan baru. *Security dilemma* menjelma sebagai dampak psikologis negara, ketika hegemoni AS mendapat tantangan serius dari kebangkitan Cina. Sebaliknya, status *emerging power* memaksa Beijing berpikir keras dalam memformulasikan strategi yang tepat guna memposisikan diri terhadap berbagai tekanan dari AS, seraya menghindari kesalahan yang justru menjadi “*boomerang*” bagi kepentingan Cina sendiri. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa *power* secara alamiah menentukan arah sifat politik internasional. Terbukti sejak awal perang dingin, struktur keamanan Asia-Pasifik berada di bawah dominasi AS, yang kemudian berperan sebagai mediator dalam setiap konflik, mendukung pemberlakuan norma regional, dan hukum internasional. Penggunaan kemampuan

¹⁴ Cui Liru, “Managing Strategic Competition Between China and the U.S”, 15 Juni 2016, dalam <http://www.chinausfocus.com/foreignpolicy/managingstrategiccompetitionbetweenchinaandtheus>, diakses pada 21 Desember 2017.

ekonomi dan kapabilitas militer sebagai jaminan atas penciptaan perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan, berada pada tanggungjawabnya.

Tatanan kawasan Asia-Pasifik yang memberikan keleluasaan bagi negara di Asia untuk fokus terhadap pembangunan politik dan ekonomi merupakan komitmen politis, guna menjaga stabilitas hegemoni AS.¹⁵ Mempertahankan dominasi strategis atas Asia-Pasifik merupakan objek vital dimana AS hendak memastikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi setiap negara untuk berada pada tatanan kawasan yang mengarah pada liberalisasi ekonomi, pemerintahan yang demokratis, dan kepatuhan terhadap hukum internasional yang berlaku.¹⁶ Cina merupakan salah satu negara Asia-Pasifik yang juga mendapatkan keuntungan dari pemberlakuan mekanisme tersebut. Sikap pesimistis semakin menyelimuti perkembangan *major-power relation*, mengupayakan bentuk lain dimana AS mengakomodasi dan memberikan keleluasaan Cina guna berkontribusi lebih terhadap tatanan kawasan, nampaknya juga tidak menjamin kepatuhan Cina terhadap struktur, norma dan hukum internasional yang berlaku. Asia-Pasifik tengah mengalami kondisi yang sulit,

¹⁵ John F. Kerry, "Nominee for Secretary of State, Statement Before the Senate Committee on Foreign Relations", 24 Januari 2013, dalam <http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/01/203455.htm>, diakses pada 18 Desember 2017.

¹⁶ Tom Donilon, "President Obama's Asia Policy and Upcoming Trip to Asia", White House, 15 November 2012, dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/11/15/remarks-national-security-adviser-tom-donilon-prepared-delivery>, diakses pada 21 Desember 2017.

dimana perkembangan regionalisme yang semakin mengarah pada integrasi ekonomi negara-negara di kawasan, tidak secara signifikan mencegah persaingan strategis yang berujung pada ancaman nyata terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan.

Donald Trump Era Baru Kepemimpinan Amerika Serikat di Asia-Pasifik

Kemenangan Donald Trump pada pemilu AS di awal tahun 2017 telah mengawali era baru bagi kepemimpinan AS di kancah global. Sebagai seorang politikus asal partai Republik, Trump sejak awal masa kampanye telah menggarisbawahi Asia-Pasifik sebagai tujuan utama politik global AS. Terlepas dari kebijakannya kontroversial keluar dari keanggotaan TPP (*Trans Pacific Partnership*), dan ditengah kekhawatiran dunia akan asumsi yang berkembang mengenai isolasionis AS, Trump tetap tidak mengubah arah kebijakan AS terhadap geopolitik di Asia-Pasifik. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menerangkan bahwa *freedom of navigation*, dan *Overflight* terhadap wilayah LCS merupakan sesuatu yang *absolute*. AS berupaya menekan Cina untuk tidak lagi membatasi arus pelayaran internasional di wilayah tersebut dan tunduk pada ketetapan hukum internasional.¹⁷ Selain itu Trump menegaskan untuk mempertahankan

¹⁷ Abraham M. Denmark, "Mattis Should Explain Trump's Asia Pacific Strategy, if One Exists", 1 Juni 2017, dalam <http://foreignpolicy.com/2017/06/01/mattis-should-explain-trumps-asia-pacific-strategy-if-one-exists/>, diakses pada 8 Desember 2017.

aliansi bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, guna meredam eskalasi konflik serta mempertahankan dominasi militer AS di Asia-Pasifik.¹⁸

Dibawah pemeritahan Trump, setidaknya ada tiga langkah kebijakan AS di Asia, pertama dengan pendekatan bilateral, AS akan secara serius menangani persaingan strategis dengan Cina di banyak isu. Kedua, dukungan terhadap aliansi diperkuat guna mengamankan kepentingan AS. Ketiga, mereformasi agenda *Rebalancing of Asia* yang semasa pemerintahan Obama bahwa “*liberal international postwar order*” dianggap belum sepenuhnya kembali meneguhkan supermasi AS.¹⁹ Menteri Pertahanan AS James N. Mattis, dalam pertemuan *Shangri-La Dialogue* menegaskan bahwa pendekatan Washington terhadap Asia-Pasifik juga tertuju pada penekanan mekanisme perdagangan bilateral dimana hal ini sejalan dengan kebijakan AS keluar dari keanggotaan TPP. Hal ini yang nampaknya menimbulkan hambatan khususnya negara-negara di kawasan, dimana ketiadaan AS dalam integrasi ekonomi akan sangat mempengaruhi keberlangsungan ekonomi kawasan.²⁰ Fenomena tersebut mengantarkan

¹⁸ Leszek Buszynski, “Why is the South China Sea so important to the U.S.?”, Australian National University, 18 Januari 2017, dalam https://www.upi.com/Top_News/Voices/2017/01/18/WhyistheSouth-ChinaSeasoimportanttotheUS/5761484751063/, diakses pada 8 Desember 2017.

¹⁹ Ashley Townshend, *America First: US Asia Policy under President Trump*, (Sydney: University of Sydney United States Studies Centre, 2017), hlm.2.

²⁰ Chia-yi Lee & Su-Hyun Lee, “The Trump Era And The Trade Architecture In The Asia Pacific”, *RSIS Policy Report*, 2017, hlm. 6.

sebuah pertanyaan mendasar mengenai apakah “*liberal international postwar order*” yang telah sejauh ini mengawali kepemimpinan AS di Asia-Pasifik akan tetap dipertahankan.²¹

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan, “*strategic patience*” dengan hanya menekankan mekanisme diplomasi multilateral terbukti tidak cukup efektif dalam meredam eskalasi konflik di kawasan. AS dibawah pemerintah Trump telah menegaskan bahwa *pre-emptive strike* dan *defensive intervention* akan sangat dimungkinkan menjadi pertimbangan strategis Trump untuk keamanan Asia-Pasifik. Hal tersebut merupakan bentuk ketegasan AS terhadap perkembangan nuklir Korea Utara.²² Beberapa kali telah melakukan uji coba perlucutan senjata nuklir, merupakan realitas bahwa menghentikan Pyongyang tidak cukup hanya dengan hukum internasional. Aliansi Washington, Tokyo, Seoul harus kembali mempertimbangkan strategi denuklirisasi Korea Utara, termasuk lakukan pendekatan diplomasi bilateral Trump dan Kim Jong Un.²³ *High-level diplomacy* menjadi langkah yang harus ditempuh Trump guna mendorong peran aktif Xi Jinping, dimana selama ini Beijing selalu menjadi tumpuan diplomasi Pyongyang ketika mendapatkan sanksi

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

²² Matt Rivers dan Joshua Berlinger, “Tillerson Promises New Policy on North Korea After ‘20 Years of a Failed Approach’”, 2 April 2017, dalam <http://edition.cnn.com/2017/03/16/politics/tillerson-japan-north-korea>, dalam Giuseppe Spatafora, “*Trump’s Foreign Policy in Asia*”, *Istituto Affari Internazionali*, 2017, hlm. 4.

²³ *Ibid*, hlm. 5.

dari dunia internasional. AS menekankan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi pertimbangan politis Cina guna menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara.²⁴

Kebijakan kontroversial Trump, kembali dilakukan dengan menemui Tsai Ing-wen Presiden Taiwan untuk meningkatkan *bilateral strategic partnership*.²⁵ Pemerintahan Trump melihat bahwa pendekatan ideologis yang mendasari hubungan diplomatik AS-Taiwan merupakan basis utama geostrategi AS dalam membendung perluasan pengaruh Cina di Asia-Pasifik. Komitmen AS atas jaminan keamanan terhadap Taiwan diwujudkan melalui perluasan kerjasama pertahanan seperti *transfer of technology*, penjualan alutsista, pertukaran perwira, hingga latihan bersama.²⁶ Mengawali kebijakan pertahanan AS, Trump melihat bahwa *trends* pembangunan kekuatan negara-negara di Asia-Pasifik memaksa AS meningkatkan anggaran pertahanan negara mencapai 54 Triliun USD pada tahun 2018 mendatang. Dengan besarnya jumlah anggaran tersebut, AS tentunya mampu menopang kebijakan *military balancing* dengan menekankan pada

²⁴ Orville Schell, Susan L. Shirk dan Chairs, *US Policy Toward China: Recommendation for a New Administration*, (UC San Diego: Asia Society Center U.S-China Relation, 2017), hlm.11.

²⁵ Amy B. Wang, Emily Rauhala, dan William Wan, "Why People Are Making Such a Big Deal About the Trump- Taiwan Call," 5 December 2016, *The Washington Post*, dalam <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/05/why-people>, diakses pada 4 Januari 2018.

²⁶ Ashley Townshend, *op.cit*, hlm. 3.

strategi *forward presence*, *major alliances*, dan *deterrence*. Pentagon menegaskan bahwa pengembangan teknologi kapal perang, dan *aircraft* menjadi pilihan guna menjaga dominasi militer AS di Asia-Pasifik. Kepala Senat Komite Angkatan Bersenjata AS John McCain, menjelaskan kebijakan terkait pengembangan 350 kapal perang merupakan bentuk realisasi terhadap "janji" kampanye Trump selama pemilu. Propaganda dominasi militer AS terhadap "Pivotal" area bertujuan untuk melancarkan strategi *deterrence* terhadap aktivitas militer Cina terutama di LCS.²⁷

Prioritas Trump terhadap isu-isu ancaman keamanan di Asia-Pasifik yang berdampak terhadap stabilitas hegemoni kawasan telah sedikit menggeser perhatian AS terhadap peran institusi regional seperti ASEAN. Trump sebaliknya, lebih menekankan pada dialog-dialog bilateral dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang di kawasan. Beberapa pejabat senior AS menilai bahwa kebijakan Trump tersebut akan mempengaruhi tingkat ketergantungan negara-negara berkembang kepada AS. Dimana selama ini AS merupakan tujuan utama bagi setiap institusi kawasan termasuk ASEAN.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 7. Baca lebih lanjut pada Senator John McCain, "Restoring American Power," *Senate Armed Services Committee*, 16 Januari 2017, dalam https://www.mccain.senate.gov/public/_cache/files/25bffe0ec-481e-466a-843f-68ba5619e6d8/restoring-american-power-7.pdf, diakses pada 8 Januari 2018.

²⁸ Ashley Townshend, *op.cit*, 2017 hlm.7. Lihat, Mike Pompeo, "Failed to go beyond reaffirming US alliances and advocating freedom of navigation manoeuvres in his South China Sea", House Resolution 830, 114th Congress, 13 Juli 2016, dalam <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/830/text>, diakses pada

Pentingnya akan keberadaan AS dalam forum-forum regional tetap dibutuhkan, sebagaimana *joint statement* antara Trump dan Presiden Jepang Shinzo Abe mengenai pentingnya mempertahankan institusi regional yang mendasari kepentingan AS terhadap pembentukan kembali tantangan di kawasan Asia-Pasifik. Mengawali era pemimpin Trump, permasalahan seperti *peacekeeping*, *non-proliferation*, *human rights*, *climate change*, *global health*, *maritime domain* dan seterusnya, nampaknya belum menjadi fokus utama AS. Beberapa pakar menilai bahwa dengan hanya menekankan pada *bilateral engagement* terhadap isu-isu konvensional yang dianggap mengancam bagi hegemoni AS di kawasan telah melahirkan kembali neo-isolasionisme AS di era kontemporer.²⁹ Hal tersebut seolah mengesampingkan eksistensi AS terhadap institusi regional, dimana hal tersebut terbukti berpengaruh terhadap “*building trust*” yang selama satu dekade belakangan ini menjadi fokus utama pemerintahan Obama.

Proteksionisme AS Respons Kemajuan Ekonomi Cina

Kebangkitan ekonomi Cina telah menghadirkan dilema tersendiri bagi AS. Dalam merumuskan kebijakan yang koheren dan efektif dalam merestrukturisasi sistem ekonomi dan perdagangan global. Tidak hanya itu, kebijakan kontroversial Trump

21 Desember 2017.

²⁹ *Ibid*, hlm. 8.

ditambah dengan sikap konfrontatif Cina di beberapa isu strategis, semakin menggiring *major-power relation* pada kondisi yang tidak menentu. Fenomena *inter-connectivity* dan *interdependence* terhadap mekanisme pasar, perdagangan dan investasi, sebagai respons terhadap globalisasi menjadi fokus utama Cina, dimana ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan keamanan Cina di kawasan.³⁰ Cina pada tahun 2015 berhasil menjadi negara eksportir terbesar dunia dengan jumlah 2,14 milyar USD. Perluasan pasar Cina juga menasar kepada AS, yang juga merupakan negara konsumen terbesar di dunia. Kebijakan proteksionisme AS, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian Cina yang merupakan negara dengan total perdagangan terbesar di dunia.³¹

Meningkatnya angka pengangguran dan defisit perdagangan, menjadi penyebab utama mengapa Trump memproteksi perekonomian AS. Disamping itu, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk kekhawatiran pemerintahan Trump dalam melihat kemajuan perekonomian Cina. Dibawah pengaruh partai Republik, Trump membangun opini bahwa layaknya sebuah peperangan ekonomi, urgensi yang dihadapi AS saat ini adalah bagaimana caranya menekan gerak maju

³⁰ Jeffrey A. Bader, “A Framework for U.S. Policy toward China, Foreign Policy at Brookings”, 2016, hlm. 5.

³¹ Tim Wallace, “Trump’s trade plans could knock China’s rise to riches off course”, 18 Febuari 2017, dalam <http://www.telegraph.co.uk/business/2017/02/18/trumpstradeplanscould-knockchinasriserichescourse>, diakses pada 8 Januari 2018.

perekonomian Cina. Riset yang dilakukan oleh *Wall Street Investment Banks*, memprediksikan, proteksi ekonomi akan dilakukan dengan menekan lebih dari 50% barang impor, dan memberikan peluang kembali pada perusahaan-perusahaan domestik AS. Dengan kebijakan tersebut keuntungan perdagangan sejak tahun 2004 dinikmati oleh Cina akan menurun drastis.³² Dengan pencapaian sebesar 161.6 Triliun USD di tahun 2015, telah menggambarkan betapa pentingnya AS sebagai basis pasar bagi Cina, sebaliknya AS juga mengandalkan Cina dalam pembelian aset berbasis Dollar dan pinjaman hutang mencapai 1,115 Triliun USD hingga Oktober 2016.³³

Dalam kondisi tertentu, proteksionisme perdagangan yang ekstrim akan memperburuk masalah yang ada dan menyebabkan munculnya kembali tekanan deflasi bagi Cina. Cepat atau lambat hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekspor Cina. Tidak hanya Cina, kapasitas produksi yang signifikan juga akan menghadirkan era baru “depresi ekonomi” bagi negara lainnya yang terikat kerjasama perdagangan dengan AS.³⁴ Namun proteksionisme ekonomi, perlu diimbangi dengan proyeksi kebijakan ekonomi ditingkat makro guna mengantisipasi lonjakan perekonomian Cina, serta mempertahankan penguasaan “aset” strategis perekonomian AS di tingkat global.³⁵

³² Phidel Vineles, “US-China Economic Ties Under Trump: Need for More Balance”, *RSIS Commentary*, No. 66, 2017, hlm. 2.

³³ *Ibid*, hlm.2.

³⁴ Tim Wallace, *op.cit*.

³⁵ Phidel Vineles, *op.cit*.

Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki saat ini, secara otomatis Cina selalu menjadi mitra dagang utama bagi setiap negara, tujuan ekspor terbesar, dan negara dengan penanaman modal asing yang tersebar hampir diseluruh negara-negara Asia. Keuntungan geografis dimana Cina berbatasan langsung baik di daratan dengan negara-negara Asia Tengah dan maritim dengan negara Pasifik Timur dan Asia Tenggara, diwujudkan dengan membangun inisiatif *Maritime Silk Roads*. Pencanaan tersebut merupakan keinginan Cina guna mewujudkan *platform* kerjasama maritim secara menyeluruh yang melibatkan negara lainnya seperti Thailand, India, Pakistan, hingga sebagian negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan mempromosikan *blue partnership, blue economic, maritime safety, blue engine* dan *maritime shipping* Presiden Cina Xi Jinping meyakini bahwa *Maritime Silk Roads* akan menjadi model integrasi maritim di abad ke-21 untuk pembangunan yang berkelanjutan.³⁶ Selain itu, Cina juga melanjutkan inisiatif OBOR (*One Belt, One Road*), dengan ini Cina mencoba menggali potensi guna memenuhi aspek mendasar di bidang ekonomi, politik budaya dan strategi. Secara khusus inisiatif tersebut akan menghantarkan peluang baru bagi Cina untuk membuka investasi terhadap kebutuhan peningkatan akses infrastruktur darat maupun laut yang

³⁶ PTI, China Unveils Maritime Silk Road Plans, *Economic Times*, 20 Juni 2017, dalam <http://m.economictimes.com/news/defese/china-unveils-maritime-silk-road-plans/articleshow/59238384.cms>, diakses pada 22 Desember 2017.

menghubungkan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah hingga Afrika.³⁷

Kebutuhan akan saling-ketergantungan dan saling-keterhubungan antar negara di era globalisasi mendorong Cina untuk lebih berperan aktif guna menunjukkan eksistensinya di tengah konstelasi politik yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Upaya menuju integrasi ekonomi layaknya momentum bagi Cina untuk tidak hanya sekedar meraih keuntungan akan perluasan pasar, namun juga sebagai ajang pembuktian bahwa Cina dengan kemampuan yang ada mampu menopang dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian kawasan. Menurut data statistik yang ada, investasi Cina mencapai 170 milyar USD dan meningkat 44,1% atau sekitar 235 Miliar USD di tahun 2016. Pencapaian tersebut menjadi langkah konkrit yang diperjuangkan Cina ditengah lesunya perekonomian global.³⁸ Layaknya sebuah “mesin” penggerak ekonomi yang tidak dapat dihentikan, maka proteksionisme dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dalam merespons pertumbuhan ekonomi Cina.³⁹ Mendapat tekanan keras dari publik AS sendiri, Trump juga menyadari akan risiko bahwa proteksionisme yang

berlebihan akan berdampak buruk bagi peluang investasi di masa depan. Art Hogan seorang analis pada *Wunderlich Securities*, menyatakan bahwa Trump telah mempelopori “*trade wars*”, dimana kondisi tersebut menentukan eksistensi AS di Asia-Pasifik.⁴⁰

Pengaruh *Major-Power Relation* terhadap Tatanan Regional Asia-Pasifik

Terlepas dari persaingan strategis yang mendominasi dinamika *Major-power relation*, AS-Cina pada kenyataannya juga menjalin *mutual-cooperation* yang saling menguntungkan. Dalam beberapa hal, *major-power relation* berada pada ambiguitas tertentu, dimana kerjasama dan kompetisi hampir berlangsung pada saat yang bersamaan. Namun yang menjadi catatan penting dalam melihat realitas tersebut adalah ketika *common interest* di beberapa bidang seperti pemanasan global, isu nuklir Iran, pembangunan global, *military-to-military communication*, HAM, *peacekeeping operation*, *global war on terror*, tidak terjadi pada permasalahan sesungguhnya seperti konflik LCS, nuklir Korea Utara, Taiwan, dan *military projection* di kawasan.⁴¹

³⁷ Shen Yamei, “Strengthening Regional Order in the Asia-Pacific: An Analysis of China Japan US Perspectives”, 26 Juli 2017, dalam http://www.ciiis.org.cn/english/201608/19/content_8975495.htm.

³⁸ Irene Chan dan Li Mingjiang, “China’s rise and role in the Asia-Pacific”, 1 Juni 2017, dalam <http://www.straitstimes.com/opinion/chinasriseandrole-in-theasiapacific>, diakses pada 23 Desember 2017.

³⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁰ Steve Liesman, “Trump’s Protectionism Biggest Threat to US Economy’s Growth, CNBC Fed Survey Respondents Say”, CNBC Fed Survey, 31 Januari 2017, dalam <https://www.cnbc.com/2017/01/30/trumpsprotectionismbiggest-threattoeconomygrowthcnbcfedsurvey-respondents.html>, diakses pada 22 Desember 2017.

⁴¹ Orville Schell, et al, *op cit*, hlm. 31.

Pertemuan bilateral Barack Obama dan Xi Jinping akhir tahun 2014, tidak secara signifikan membangun *mutual-trust* yang diharapkan bagi pembentukan kembali tatakelola kawasan. Rivalitas antar keduanya menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kembali komitmen mencapai perdamaian, stabilitas keamanan bagi kesejahteraan Asia-Pasifik. Layaknya sebuah konsekuensi logis, hadirnya Cina sebagai *emerging power* tentu berdampak politis bagi perkembangan *major-power relation*, dan pengaruhnya terhadap Asia-Pasifik. Terlebih *liberal international postwar order*, yang selama ini berada dibawah kepemimpinan tunggal AS dianggap tidak dapat mengakomodir kebangkitan Cina.⁴² Gordon Chang seorang kolumnis Amerika Serikat keturunan Cina, dalam karyanya *The Coming Collapse of China*, menyatakan bahwa kebangkitan Cina telah menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai apakah fenomena tersebut sama artinya dengan kejatuhan AS? Selanjutnya apakah tatanan regional yang berlaku saat ini mampu melandasi transisi kekuasaan dimana supremasi Washington akan jatuh ke Beijing?⁴³

Dalam pandangan realisme, kedua pertanyaan tersebut lebih menggambarkan sikap pesimistis yang muncul ketika

⁴² Takashi Inoguchi dan Paul Bacon, "Empire, Hierarchy, and Hegemony: American Grand Strategy and the Construction of Order In the Asia-Pacific", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol.5, No 2, 2005, hlm. 120.

⁴³ Alexander L. Vuving, *What Regional Order for the Asia-Pacific? China's Rise, Primacy Competition, and Inclusive Leadership*, (Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2012), hlm. 214.

liberal international postwar order tidak lagi sepenuhnya dapat menjamin Cina untuk tunduk dalam tatanan regional dibawah dominasi AS. Adapun tatanan regional Asia-Pasifik juga dihadapkan pada transformasi yang "unik", ketika paradigma regionalisme yang terus mengarahkan pada perkembangan integrasi ekonomi kawasan, secara bersama juga menyaksikan intensitas konflik yang cukup tinggi. Dengan demikian *major-power relation* telah melahirkan sebuah paradoks bagi tatanan regional Asia-Pasifik. Dikatakan paradoks karena persaingan strategis antara AS-Cina yang berujung pada peningkatan intensitas konflik, juga diiringi dengan komitmen ke dua negara tersebut terhadap stabilitas keamanan kawasan seperti yang tertuang dalam ADMM (*ASEAN Defense Ministerial Meeting*) ADMM+, ARF (*ASEAN Regional Forum*), EAS (*East Asia Summit*) dan *Shangri-La Dialogue*.

Skema *balance of power* dalam beberapa isu-isu tertentu menjadi bentuk lain daripada karakteristik tatanan regional Asia-Pasifik, khususnya ketika menggambarkan persaingan strategis yang terjadi antara AS-Cina. John Mearsheimer seorang tokoh realis menyatakan, berada pada posisi yang setara dengan AS, jelas merupakan ancaman terhadap *status quo*, dimana Cina sangat berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan AS dan aliansinya di Asia-Pasifik.⁴⁴ Sampai dengan

⁴⁴ John Mearsheimer, "Maintain U.S. Dominance in The Western Hemisphere and Prevent China from Achieving Regional Hegemony in Asia, 21 Agustus 2015, dalam <http://nationalinterest.org/>

terpilihnya Trump sebagai Presiden AS, komitmen *bilateral defense alliance*, Jepang dan Korea Selatan tetap menjadi “pilar” koersif diplomasi AS. Dengan ini kehadiran militer AS tidak hanya menjadi “payung” keamanan terhadap ancaman nuklir Korea Utara, namun strategi *deterrence* yang bertujuan untuk mengawal kepemimpinan AS atas Asia-Pasifik.⁴⁵ *Major-power relation* yang ditandai dengan kompetisi atas penguasaan geografis seperti yang terjadi pada konflik LCS, serta peningkatan kapabilitas militer, telah menggambarkan aktualisasi dari skema *balance of power*.

Sampai pada saat ini, hegemoni AS tetap tidak terbantahkan, namun disaat yang bersamaan belum didapati satupun formulasi yang menjamin masa depan pembentukan kembali tatanan regional Asia-Pasifik. Berkaca pada dinamika *major-power relation*, terdapat dua elemen mendasar yang harus dipahami, pertama kebangkitan Cina tentu menginginkan terwujudnya “*shared regional leadership*” sebagai “*prototype*” baru terhadap tatanan regional Asia-Pasifik. Namun upaya tersebut pada kenyataan bersinggungan dengan eksistensi hegemoni AS. Kedua, permasalahan yang ada tersebut pada akhirnya menjadi tantangan serius bagi stabilitas keamanan Asia-Pasifik, ketika *security dilemma* telah “menyelimuti” seluruh interaksi antara AS dan Cina.⁴⁶ Sebagai jalan tengah, komitmen AS tetap mengedepankan penciptaan

[feature/weaskedjohnmearsheimerwhatshouldbethepurpose13642](#), diakses pada 8 Desember 2017.

⁴⁵ Jeffrey A. Bader, *op.cit*, 2016, hlm.12.

⁴⁶ Alexander L. Vuving, *op cit*, 2012, hlm.222.

tatanan kawasan yang lebih bersifat inklusif dimana permasalahan stabilitas keamanan Asia-Pasifik telah sewajarnya menjadi tanggungjawab bersama melalui mekanisme institusi regional.⁴⁷

Namun layaknya sebuah dualisme, disamping melalui mekanisme institusi regional, *major-power relation* mengharuskan AS mengambil langkah *preventive* dengan melakukan *direct diplomacy*, kepada seuruh “*stakeholders*” di kawasan termasuk Australia, India, Korea Selatan, Jepang, ASEAN dan Cina. Dualisme tersebut meupakan *bargaining tools* dalam meyakinkan para “*stakeholders*” terhadap pembentukan kembali tatanan regional yang stabil dibawah naungan hegemoni AS. Langkah tersebut merupakan bentuk kesadaran AS bahwasanya insitusi regional tidak memiliki kapasitas yang cukup dan *legally binding* yang sepenuhnya dapat mengikat perilaku negara untuk berada dibawah legalitas hukum dan norma regional yang telah disepakati.⁴⁸ Seluruh pihak sepakat jika terciptanya perdamaian dan keamanan Asia-Pasifik merupakan kepentingan bersama, namun upaya tersebut tidak terlepas dari kepentingan AS yaitu stabilitas hegemoni.⁴⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa tatanan regional Asia-Pasifik sekarang ini, memiliki

⁴⁷ Andrew Browne, “Can China Be Contained?” *The Wall Street Journal* online, 12 Juni 2015, dalam <https://www.wsj.com/articles/can-china-be-contained-1434118534>, diakses pada 21 Juli 2016.

⁴⁸ Jeffrey A. Bader, *op.cit*, 2016, hlm. 12.

⁴⁹ Jean Pierre Lehmann, “Phasing out the US (dis)order in the Asia Pacific”, *East Asia Forum*, 8 Juni 2017, dalam <http://www.eastasiaforum.org/2017/06/08/phasingouttheusdisorderintheasiapacific/>.

keterbatasan ketika upaya menciptakan stabilitas keamanan kawasan, juga menuntut agenda global yaitu transisi kepemimpinan Washington terhadap Beijing.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa persaingan strategis AS-Cina telah menciptakan eksklusivitas tersendiri bagi tatanan regional di Asia-Pasifik, dimana *power* menjadi alternatif utama bagi kedua negara, untuk saling menancapkan pengaruh atas kawasan Asia-Pasifik. Brig Arun Sahgal profesor sekaligus pengamat politik internasional pada *Delhi Policy Group*, dalam paparannya yang bertajuk *Asia– Pacific Regional Order: Strategic Flux To Mutual Restraint*, menyatakan bahwa hubungan AS-Cina dalam dua dekade terakhir ini mengarah pada *distribution of power* yang tidak menutup kemungkinan akan kembali menginisiasi terbentuknya “*geopolitical realism*” di kawasan.⁵⁰ Sebagaimana disinggung di awal, kompleksitas tantangan terletak pada disorientasi *major-power relation* yang bermuara pada konflik kepentingan AS-Cina di kawasan. AS menyadari bahwa berada pada *status-quo* tidaklah berarti terlepas dari pelemahan progresifitas hegemoni. Hal ini mengingatkan akan upaya Cina dalam memanfaatkan peluang geopolitik menuju “*neo-Asian order*” dimana sentralistik kepemimpinan Asia-Pasifik berpihak kepada Beijing.⁵¹ Konflik

⁵⁰ Lihat lebih lanjut Brig Arun Sahgal, “Asia– Pacific Regional Order: Strategic Flux To Mutual Restraint”, *Delhi Policy Group*, http://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/remarks-at-primakov-reading-russia-1037.pdf, hlm.

4.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 11.

LCS contohnya menciptakan “ruang” bagi Cina guna mempertanyakan kembali legitimasi AS sebagai “penjamin” stabilitas keamanan kawasan. *Major-power relation* mendorong fragmentasi politik dimana pentingnya penataan kembali terhadap tatanan regional. *Bargaining power* pada akhirnya menjadi cara tentang bagaimana memperlihatkan perdebatan yang berlangsung antara hegemoni AS dan Cina sebagai *emerging power*.

Kesimpulan

Pengaruh dinamika *major-power relation* yang berlangsung dalam dua dekade terakhir ini telah memunculkan persepsi yang beragam tentang bagaimana mengupayakan kembali pembentukan tatanan regional di Asia-Pasifik. Pertama tatanan regional Asia-Pasifik yang berbasis pada *liberal international postwar order* sejak berlangsungnya awal Perang Dingin, dianggap sudah tidak lagi menjamin Cina untuk tunduk dibawah dominasi AS. Sikap kontra-produktif Cina terhadap kepentingan AS di kawasan, ditambah tindakan provokatif di wilayah sengketa LCS, berdampak buruk terhadap proses perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *major-power relation*, memiliki keterbatasan ketika upaya menciptakan stabilitas keamanan kawasan, juga menuntut agenda global yaitu transisi kepemimpinan Washington terhadap Beijing.

Kedua, berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan, secara tidak

langsung persaingan strategis AS-Cina telah mengadopsi skema *balance of power* sebagai karakteristik lain dari tatanan regional Asia-Pasifik. Dibawah pemerintah Trump, AS telah menegaskan bahwa *pre-emptive strike* dan *defensive intervention* akan sangat dimungkinkan menjadi pertimbangan kebijakan strategis Trump untuk keamanan di Asia-Pasifik. Adapun tuntutan Cina akan terwujudnya “*shared regional leadership*” sebagai “*prototype*” bagi tatanan regional Asia-Pasifik pada kenyataan bersinggungan dengan eksistensi hegemoni AS. Berada pada posisi yang setara dengan Cina, jelas merupakan ancaman terhadap *status quo*. Hal tersebut justru akan melemahkan *bargaining position* AS sebagai negara adidaya tunggal dunia. Dengan demikian, kompleksitas permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa *major-power relation* telah menciptakan eksklusivitas tersendiri bagi tatanan regional di Asia-Pasifik, ketika hegemoni AS harus berhadapan dengan fenomena kebangkitan Cina yang mengarah pada pergeseran geopolitik menuju sentralistik kepemimpinan Asia-Pasifik.

Daftar Pustaka

Buku

- Cronin, Patrick M. 2013. "Power and Order in the South China Sea : A Strategic Framework for U.S. Policy". USA: Center for a New American Security (CNAS).
- Dormandy, Xenia dan Rory Kinane. 2014. "Asia-Pacific Security A Changing Role for the United States". Chatham House Report: The Royal Institute of International Affairs.
- Mills, Chris. 2015. *The United State Asia-Pacific Policy and the Rise of The Dragon*. Sydney: Australian Defense College.
- Mahnken, Thomas G. 2012. *Asia in The Balance: Transforming US Military Strategy in Asia*. Washington: A Project of America Institute.
- Townshend, Ashley. 2017. *America first: US Asia policy under President Trump*. Sydney: University of Sydney United States Studies Centre.
- Vuving, Alexander L. 2012. "What Regional Order for the Asia-Pacific? China's Rise, Primacy Competition, and Inclusive Leadership". Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Yahuda, Michael. 2004. *The International Politics of the Asia-Pacific*. New York: Routledge Curzon.
- Zhiqun Zhu. 2006. *US-China Relations in The 21st Century Power Transition and Peace*. New York: Routledge.

Jurnal

- Bader, Jeffrey A. 2016. *A Framework for U.S. Policy toward China*. *Journal Foreign Policy at Brooking Institute*.
- Hagiwara, Yoko. 2006. "U.S. European Policies Toward China Amid Its Economic and Political Rise". *Tokyo Economic Review*. Vol 1. No.10.
- Inoguchi, Takashi dan Paul Bacon. 2005. "Empire, Hierarchy, and Hegemony: American Grand Strategy and the

Construction of Order In the Asia-Pacific". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 5. No. 2.

- Kotani, Tetsuo. 2014. "US-Japan Allied Maritime Strategy: Balancing the Rise of Maritime China". *Strategic Japan*. Center for Strategic and International Studies.
- Lee, Chia-yi dan Su-Hyun Lee. 2017. "The Trump Era And The Trade Architecture In The Asia Pacific". *RSIS Policy Report*.
- Orville Schell, Susan L. Shirk dan Chairs. 2017. *US Policy Toward China: Recommendation For A New Administration*. UC San Diego: Asia Society Center U.S-China Relation.
- Vineles, Phidel. 2017. "US-China Economic Ties Under Trump: Need for More Balance". *RSIS Commentary*. No. 066.

Website

- Buszynski, Leszek, "Why is the South China Sea so important to the U.S.?", Australian National University, 18 Januari 2017, dalam https://www.upi.com/Top_News/Voices/2017/01/18/Why-istheSouthChinaSeasoimportantto-theUS/5761484751063/, diakses pada 8 Desember 2017.
- Browne, Andrew, "Can China Be Contained?" *The Wall Street Journal* online, 12 Juni 2015, dalam <https://www.wsj.com/articles/can-china-be-contained-1434118534>, diakses pada 21 Juli 2016.
- Chan, Irene dan Li Mingjiang, "China's rise and role in the Asia-Pacific", 1 Juni 2017, dalam <http://www.straitstimes.com/opinion/chinasriseandroleintheasiapacific>, diakses pada 23 Desember 2017.
- Donilon, Tom, "President Obama's Asia Policy and Upcoming Trip to Asia", White House, 15 November 2012, dalam <https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2012/11/15/remarksnational-securityadvisor-tom-donilon-prepared-delivery>, diakses pada 21 Desember 2017.

- Denmark, Abraham M, "Mattis Should Explain Trump's Asia Pacific Strategy, if One Exists", 1 Juni 2017, dalam <http://foreignpolicy.com/2017/06/01/mattis-should-explain-trumps-asiapacific-strategy-if-one-exists/>, diakses pada 8 Desember 2017.
- Daly, Robert, "How Washington Can Manage Sustainable Strategic Competition With China", *The Diplomat*, 22 September 2015, dalam <http://thediplomat.com/2015/09/how-washington-can-manage-sustainable-strategic-competition-with-china/>, diakses pada 21 Desember 2017.
- Davison, Helen, "South China Sea Dispute: Beijing Places missile launches on island-as it happened", 17 Februari 2016, dalam <http://www.theguardian.com/world/live/2016/feb/17/south-china-sea-disputes-bajing-Places-missile-launches-on-island-live>, diakses pada 2 Juli 2017.
- Gramone, Jim, "Asia-Pacific Maritime Security Strategy", dalam 15 Februari 2015, <http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-PMaritimeSecurityStrategy08142015-1300-FINALFORMAT.PDF>, diakses pada 17 Maret 2017.
- Kerry, John F, "Nominee for Secretary of State, Statement Before the Senate Committee on Foreign Relations", 24 Januari 2013, dalam <http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/01/203455.htm>, diakses pada 18 Desember 2017.
- Liru, Cui, "Managing Strategic Competition Between China and the U.S", 15 Juni 2016, dalam <http://www.chinausfocus.com/foreignpolicy/managingstrategic-competitionbetweenchinaandtheus>, diakses pada 21 Desember 2017.
- Liesman, Steve, "Trump's Protectionism Biggest Threat to US Economy's Growth, CNCFed Survey Respondents Say", CNCFed Survey, 31 Januari 2017, dalam <https://www.cnbc.com/2017/01/30/trumpsprotectionism-biggest-threat-to-us-economy-growth-cnbc-fed-survey-respondents-say.html>, diakses pada 4 Juli 2017.
- Lehmann, Jean Pierre, "Phasing out the US (dis)order in the Asia Pacific", *East Asia Forum*, 8 Juni 2017, dalam <http://www.eastasiaforum.org/2017/06/08/phasing-out-the-us-disorder-in-the-asiapacific/>, diakses pada 22 Januari 2018.
- McCain, John, "Restoring American Power," *Senate Armed Services Committee*, 16 Januari 2017, dalam https://www.mccain.senate.gov/public/_cache/files/25bff0ec-481e-466a-843f-68ba5619e6d8/restoring-american-power-7.pdf, diakses pada 8 Januari 2018
- Mearsheimer, John. "Maintain U.S. Dominance in The Western Hemisphere and Prevent China from Achieving Regional Hegemony in Asia, 21 Agustus 2015, dalam <http://nationalinterest.org/feature/we-asked-john-mearsheimer-what-should-be-the-purpose-13642>, diakses pada 8 Desember 2017.
- Pompeo, Mike, "Failed to go beyond reaffirming US alliances and advocating freedom of navigation manoeuvres in his South China Sea", House Resolution 830, 114th Congress, 13 Juli 2016, dalam <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/830/text>, diakses pada 21 Desember 2017.
- PTI, China Unveils Maritime Silk Road Plans, *Economic Times*, 20 Juni 2017, dalam <http://m.economictimes.com/news/defence/china-unveils-maritime-silk-road-plans/articleshow/59238384.cms>, diakses pada 22 Desember 2017.
- Rivers, Matt dan Joshua Berlinger, "Tillerson Promises New Policy on North Korea After '20 Years of a Failed Approach'", 2 April 2017, dalam <http://edition.cnn.com/2017/03/16/politics/tillerson-japan-north-korea>, dalam Giuseppe Spatafora, "Trump's Foreign Policy in Asia", *Istituto Affari Internazionali*, 2017.
- Sahgal, Brig Arun, "Asia- Pacific Regional Order: Strategic Flux to Mutual Restraint", *Delhi Policy Group*, dalam http://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/remarks-

at-primakov-reading-russia-1037.pdf,
diakses pada 22 Januari 2018.

Wang, Amy B, Emily Rauhala, dan William Wan, "Why People Are Making Such a Big Deal About the Trump- Taiwan Call," 5 December 2016, *The Washington Post*, dalam <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/05/why-people>, diakses pada 4 Januari 2018.

Wallace, Tim, "Trump's trade plans could knock China's rise to riches off course", 18 Februari 2017, dalam <http://www.telegraph.co.uk/business/2017/02/18/trumpstradeplanscouldknockchinas-riserichescourse>, diakses pada 8 Januari 2018.

Yamei, Shen, "Strengthening Regional Order in the Asia-Pacific: An Analysis of China Japan US Perspectives", 26 Juli 2017, dalam http://www.ciis.org.cn/english/201608/19/content_8975495.htm, diakses pada 22 Januari 2018.